

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Indeks Pembangunan Manusia**

###### **a. Konsep Indeks Pembangunan Manusia**

*United Nations Development Programme (UNDP)* merumuskan konsep pembangunan manusia (*human development*) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mengkaji manusia dari dua sisi yang berbeda, sisi yang pertama mengkaji peningkatan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan melalui pendidikan, keterampilan dan memperbaiki taraf kesehatan. Sisi kedua mengkaji bagaimana pemanfaatan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki guna meningkatkan produktivitas.

*United Nation Development Programme (UNDP)* mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan yang mengutamakan penduduk melalui upaya pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar manusia agar bisa ikut berperan dalam berbagai bidang pembangunan. Manusia mempunyai arti penting dalam pembangunan karena dianggap sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan

mempunyai tujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. *United Nation Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses kegiatan pembangunan dalam model pembangunannya.

b. Ruang Lingkup Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada aspek pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*).

UNDP (1995) mengajukan beberapa premis yang kaitannya sangat penting dalam pembangunan manusia. Pertama, pembangunan harus lebih fokus terhadap penduduk. Dalam pengertian ini manusia dijadikan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek manusia mempunyai peran untuk utama untuk menentukan arah bagaimana arah dan keberlangsungan dari suatu proses pembangunan dan sebagai obyek manusialah yang menjadi pihak yang akan menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan ini berupaya untuk meningkatkan atau memperbesar pilihan-pilihan penduduk bukan hanya di pendapatannya saja.

Hal ini menuntut sebuah konsep pembangunan manusia yang terpusat pada aspek penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Ketiga, pembangunan manusia tidak hanya fokus pada upaya peningkatan kemampuan atau kapabilitas manusia, tetapi juga fokus pada upaya-upaya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki manusia secara optimal. Keempat, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Kelima, pembangunan manusia harus didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pilar produktivitas bermakna bahwa setiap penduduk harus diberi kesempatan atau akses yang luas untuk meningkatkan produktivitas dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan. Pilar pemerataan artinya semua penduduk mempunyai kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi maupun sosial. Pilar berkesinambungan mempunyai makna bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi maupun sosial tidak hanya untuk kepentingan kita akan tetapi untuk generasi di masa depan. Sementara itu, pilar pemberdayaan memiliki makna bahwa semua penduduk harus berpartisipasi penuh dalam menentukan arah kehidupan dan mengambil manfaat dari pembangunan tersebut.

### c. Pengukuran Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup diukur dengan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir (*life expectancy at age 0* atau  $e_0$ ). Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (*mean years of schooling*). Standar kehidupan yang layak diukur dengan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan.

### d. Manfaat dan Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia

Manfaat terbesar dari IPM adalah kemampuan indeks ini untuk mengungkapkan bahwa suatu negara bisa melakukan sesuatu yang lebih baik meski dalam pendapatan yang rendah. Menurut Todaro dan Smith (2006), bahwa IPM juga mampu mengungkapkan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan mbisa saja memiliki peran yang lebih kecil dalam proses pembangunan manusia.

Secara spesifik, BPS menyampaikan beberapa tujuan penghitungan IPM di Indonesia. Pertama, untuk mengetahui perkembangan pembangunan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, mengetahui

pencapaian pemerintah pada program-program peningkatan kualitas hidup. Ketiga, mendapat saran apabila terjadi ketidakberhasilan pembangunan. Keempat,

capaian program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, mendapatkan masukan atas ketidakberhasilan atau kekurangberhasilan pembangunan. Keempat, sebagai alokator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU). Kelima, mengukur keterkaitan proses pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya (BPS, 2011).

Dalam implementasinya, IPM memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang begitu luas hanya dengan menggunakan pendekatan indeks komposit, artinya masih banyak aspek dan dimensi yang belum terukur dengan indeks tersebut. Kedua, indeks ini masih ada kelemahan dalam segi data dan interpretasinya. Ketiga, sebagai sebuah angka rata-rata, indeks pembangunan manusia dan indikator penyusunannya kehilangan informasi yang berkaitan dengan distribusi.

#### e. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya

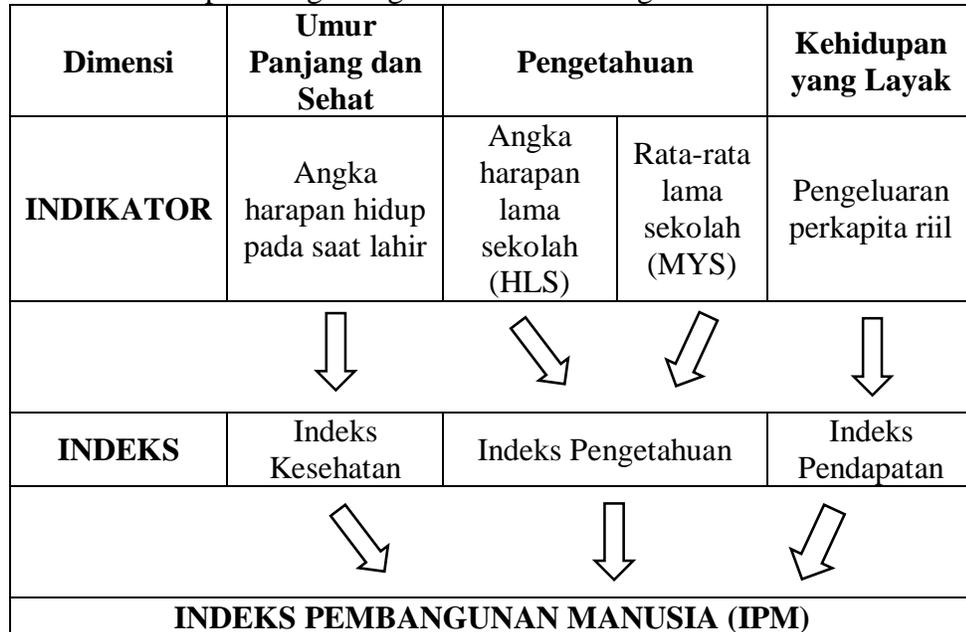
Tahap pertama dalam penghitungan IPM yaitu penentuan indikator dari masing-masing dimensi pembangunan manusia. Penghitungan IPM menggunakan metode baru yang mulai digunakan pada tahun 2010. Dimensi umur panjang dan sehat diukur menggunakan indikator angka harapan hidup

penduduk pada saat lahir (AHH) dalam satuan tahun. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan dua indikator pendidikan yakni dari angka harapan lama sekolah (HLS) dan dari rata rata lama sekolah (RLS). HLS dihitung menggunakan data patrisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas dalam satuan tahun, sementara RLS dihitung menggunakan referensi penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas) dalam satuan tahun. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan telah menyelesaikan masa belajar.

Ada beberapa perbedaan antara indikator yang digunakan oleh UNDP dan yang diimplementasikan dalam penghitungan IPM di Indonesia oleh BPS. Letak perbedaan tersebut terdapat pada indikator pengetahuan dan indikator kehidupan yang layak.

Tahap yang kedua dalam penghitungan IPM adalah adalah menentukan nilai indeks indikator dari ketiga dimensi pembangunan manusia. Tahap yang selanjutnya adalah menghitung nilai indeks setiap dimensi dan kemudian menghitung nilai IPM berdasarkan nilai indeks ketiga dimensi menggunakan metode rata-rata ukur (geometrik). Tahapan penghitungan IPM secara ringkas terangkum dalam Diagram 2.1

Gambar 2.1  
Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS, 2011

f. Dimensi Kesehatan

Kesehatan menjadi unsur terpenting dari modal manusia disamping pendidikan. Dimensi kesehatan yang dilihat dari umur yang panjang dan sehat menjadi fokus yang penting dalam pembangunan manusia, karena umur yang panjang dan sehat akan sangat memberikan pengaruh yang besar pada tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara. Artinya, dimensi kesehatan juga memiliki peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk pada saat lahir dinilai mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum sehingga dipilih menjadi indikator kesehatan. Semakin panjang umur hidup penduduk di suatu

daerah menggambarkan derajat kesehatan penduduk yang semakin meningkat. Derajat kesehatan yang semakin meningkat akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, sehingga tingkat pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

g. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan menjadi salah satu unsur terpenting dari modal manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa dengan bangsa lainnya ialah dimensi pengetahuan. Output dari proses pendidikan formal dan non formal akan menghasilkan tenaga kerja yang terdidik yang bisa mempengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Banyak fakta yang mengatakan bahwa kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengetahuan.

Dari sekian banyak indikator pendidikan yang tersedia, hanya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dianggap cukup tepat untuk menggambarkan pencapaian pembangunan di bidang pendidikan oleh penduduk di suatu wilayah. Artinya, kedua indikator tersebut mampu menggambarkan stok pencapaian pengetahuan yang menjadi unsur modal manusia di suatu wilayah.

1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Konsep RLS atau *years of schooling* didefinisikan sebagai lamanya seseorang dalam mengikuti pendidikan formal yang dimulai sejak masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir atau jenjang pendidikan yang ditempuh. Lamanya seseorang bersekolah menjadi salah satu ukuran investasi pendidikan yang dicapai individu, sehingga ukuran ini sekaligus menggambarkan seberapa tinggi capaian pendidikan manusia.

Sebagai indikator tunggal, RLS mampu menjadi ukuran akumulasi modal manusia suatu wilayah. Ukuran ini belum mempertimbangkan kasus-kasus siswa tidak naik kelas, siswa putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan siswa yang masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya terlambat masuk sekolah. Akibatnya, nilai dari jumlah tahun bersekolah bisa menjadi terlalu tinggi (*overestimate*) atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

## 2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator HLS mulai digunakan dalam penghitungan IPM tahun 2010 untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dianggap sudah tidak mampu lagi menjelaskan perbedaan capaian kualitas pendidikan antar wilayah, karena beberapa daerah sudah memiliki level mendekati 100 persen. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam satuan tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah

terkait usia awal dalam program wajib belajar. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan berasal dari Susenas. Untuk melihat penduduk yang tidak masuk dalam rangkuman Susenas, HLS dikoreksi dengan mendata seberapa banyak siswa yang bersekolah di pesantren dengan sumber data dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

#### h. Dimensi Kehidupan Layak

Dimensi ketiga dari ukuran IPM merepresentasikan aspek ekonomi yakni standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan dengan daya beli wilayah setempat dan disempurnakan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita setahun.

## **2. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Badan Pusat Statistik (2017), menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah domestik di suatu negara yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode atau tahun tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh residen atau non-residen.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto untuk tingkat regional (provinsi) dan Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan dengan 2 perhitungan yaitu, menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan yang dilakukan secara langsung dengan menggali dari sumber data asli daerah yang menggambarkan bagaimana kondisi daerah tersebut. Berbeda dengan metode tidak langsung yang merupakan perhitungan yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke daerah masing-masing.

Metode perhitungan pendapatan nasional meliputi tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Dengan perhitungan pendekatan produksi pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh produksi barang dan jasa selama periode tertentu (Yuliadi, 2007).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disajikan dengan dua penilaian, yaitu PDRB atas dasar berlaku dan PDRB atas dasar konstan. Dimana atas dasar berlaku adalah suatu nilai barang dan jasa yang dihitung berdasarkan atas harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB atas harga konstan

adalah perhitungan nilai suatu barang dan jasa yang didasarkan atas harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Dalam perhitungannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung menggunakan empat pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga dengan pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dihasilkan dengan cara mengurangi seluruh output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi atau bisa juga dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada suatu barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan seluruh sektor industri yang ada.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa faktor produksi yaitu, upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada perusahaan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk memenuhi kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan untuk modal dan ekspor, nilai dari barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestic, total pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar. Jika dilihat dari segi penggunaannya, maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk:

- a) Konsumsi rumah tangga
- b) Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- c) Konsumsi pemerintah
- d) Pembentukan modal tetap bruto (investasi)
- e) Perubahan stok
- f) Ekspor neto

d. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang

ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu Kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat menggunakan salah satu dari empat metode diatas, salah satunya ialah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai kelompok masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + (x - m)$$

Dimana, C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pembentukan modal (investasi), G adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan (x-m) adalah selisih nilai ekspor impor. Perlu disepakati bahwa I (investasi) dalam bidang yang produktif sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). G adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan di luar bidang produktif. Untuk dapat mengetahui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan model pertumbuhan neo klasik dengan menitikberatkan pada fungsi cobb-douglas.

Menurut Arsyad (1999) fungsi produksi cobb-douglas tersebut dapat dituliskan dengan persamaan berikut:

$$Y = AL^\alpha K^\beta$$

Dimana, Y adalah total produksi, L adalah tenaga kerja, A adalah produktivitas faktor total,  $\alpha$  dan  $\beta$  adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal masing-masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia.

Dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB), seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan kelompok dalam sektor ekonomi. Ini disesuaikan dengan pembagian yang digunakan dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat nasional. Pembagian ini mengikuti aturan dari *System of National Accounts* (SNA). Hal ini juga untuk memudahkan para analis membandingkan Produk domestik regional bruto (PDRB) antar provinsi dan antara produk domestik regional (PDRB) dengan produk domestik bruto (PDB).

### **3. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Teori pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### **a. Teori Makro**

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat digunakan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang menggunakan biaya pengeluaran pemerintah. Dalam teori makro pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi tiga pos utama (Boediono, 1999), yaitu:

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
  - 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai memiliki pengaruh proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara langsung.
  - 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer paymen. Transfer paymen ialah pencatatan pembayaran atau pemberian subsidi atau bantuan langsung, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat dan pembayaran pensiunan bukan untuk pembelian barang dan jasa di pasar barang dan jasa.
- b. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tahap awal, terjadi perkembangan ekonomi, presentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar karea pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- 2) Tahap menengah, terjadi pembangunan ekonomi, peran investasi pemerintah masih sangat dibutuhkan, akan tetapi investasi swasta juga mempunyai peran yang semakin besar. Musgrave berpendapat bahwa

presentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil dan presentasi investasi swasta terhadap GNP semakin besar.

- 3) Tahap selanjutnya, pemerintah beralih aktivitas dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat dan program kesejahteraan hari tua.

Besarnya pengeluaran pemerintah pada tahap ini disebabkan oleh beberapa hal seperti banyak terjadinya kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi tersebut (Mangkoesebroto, 2001).

#### c. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah: (Dumairy, 1999 dalam Winarti, 2014)

- 1) Dalam rangka peningkatan perlindungan dan keamanan.
- 2) Adanya peningkatan pendapatan masyarakat.
- 3) Adanya urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
- 4) Perkembangan demokrasi.
- 5) Adanya ketidakefisienan birokrasi dalam mengiringi perkembangan pemerintah.

#### d. Teori Peacock dan Wismen

Teori Peacock dan Wismen didasarkan pada suatu analisis tentang penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan menaikkan atau memperbesar pembayaran pajak. Meskipun pemerintah tahu bahwa masyarakat banyak yang tidak menyukai pembayaran pajak yang terlalu tinggi guna memenuhi pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat.

Jadi, kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Mangkoesobroto, 2001).

Peacock-Wiseman mengatakan bahwa pungutan pajak yang semakin meningkat disebabkan oleh perkembangan ekonomi, meskipun tidak ada yang berubah dari jumlah pungutan pajaknya, yang dalam pergantiannya akan menaikkan pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak yang besar mengakibatkan investasi dan dana swasta menjadi menurun. Efek ini yang biasa disebut dengan efek penggantian (*displacement effect*).

Jika timbul efek penggantian dalam perekonomian pada saat terjadinya gangguan sosial, walaupun masalah ini sudah berakhir maka akan timbul permasalahan lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Masalah tersebut menjelaskan bahwa masalah sosial mengakibatkan timbulnya kesadaran terhadap masyarakat mengenai ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah setelah selesainya permasalahan sosial tersebut. Kesadaran inilah yang mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pungutan pajak

yang lebih besar, sehingga pendapatan pemerintahpun akan meningkat. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. (Mangkoesebroto, 2001 dalam Winarti, 2014).

e. Teori Mikro

Teori mikro menganalisis faktor-faktor apa saja yang menimbulkan permintaan terhadap barang publik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan barang publik tersebut guna mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah. Interaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran barang publik guna menentukan seberapa banyak jumlah barang publik yang harus di sediakan melalui penggunaan anggaran belanja pemerintah. Jumlah dari barang publik yang tersedia tersebut bisa menimbulkan permintaan akan barang lainnya.

f. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan mempunyai peranan penting. Pertumbuhan ekonomi bangsa dipengaruhi secara penuh oleh pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas dan fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan.

Jadi, pada umumnya pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap

perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (*human investment*) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi.

Investasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya investasi pemerintah di bidang pendidikan, masyarakat yang miskin akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tingginya dana yang dikeluarkan pemerintah pada bidang pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan di bidang pendidikan yaitu jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi akan meningkat. Semakin meningkatnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka akan memudahkan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatannya yang didapat dari hasil kemajuan teknologi, sehingga akan meningkatkan standar ekonomi dan kehidupan bagi suatu bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi

bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Winarti, 2014).

## **B. Pemikiran Terdahulu**

Penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Negara Miskin Asia dan Afrika oleh Nurul dan Said Muhammad (2016). Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi Linear Berganda (OLS). Indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan sebagai variabel dependen dan GDP perkapita, pengeluaran pemerintah dan pengeluaran konsumsi digunakan sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan GDP perkapita dan pengeluaran konsumsi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di negara miskin Asia dan Afrika.

Pada tahun 2017 Asmita dkk. Melakukan penelitian yang berjudul “*Analysis of Factor Affecting the Human Development Index in North Sumatera Province*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel kemiskinan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) sedangkan, variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Sumatera.

Bhakti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2012-2018”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel rasio ketergantungan dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) sedangkan, variabel PDRB dan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2011 Mirza melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah”. Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Di tahun 2017 Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina melakukan penelitian di Kota Malang dengan mengambil judul “*Analysis on Factors that Influence the Human Development Index of Malang Regency based on Regional Approach and Panel Regression*”. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada tiap tipologi wilayah pengembangan Kabupaten Malang, diantaranya: faktor jumlah sarana kesehatan, jumlah perawat-bidan dan kepadatan penduduk pada tipologi I (urban); faktor rasio sekolah per siswa SD dan kepadatan penduduk pada tipologi II (peri-urban); dan faktor jumlah perawat-bidan pada tipologi III (rural).

Pada tahun yang sama 2017 Basnawi, Amin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2010-2015”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data panel dengan model random effect model (REM). Hasil dari analisis model data panel menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel rasio gini dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Shela Tamara, 2018 dengan judul “*The Analysis of Factors Affecting Human Resource Investment Towards Economic Growth in Java Period 2010-2016*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan (pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angkatan kerja yang bekerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan, investasi pada pendidikan (pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

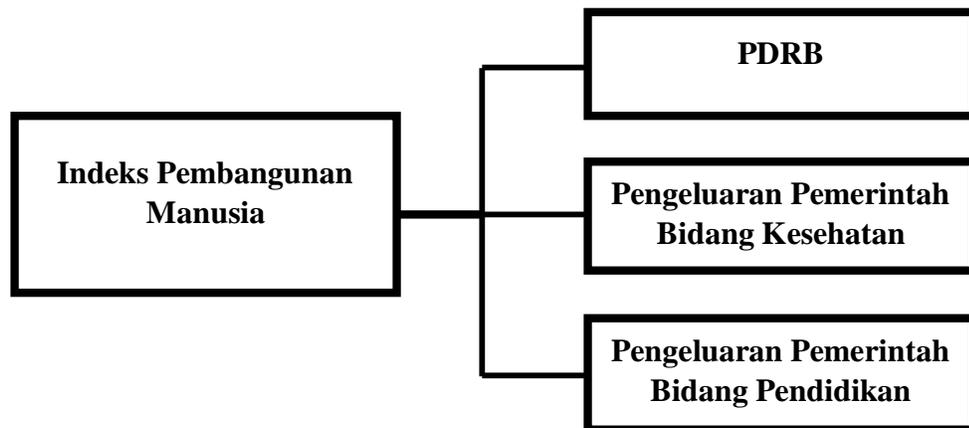
Mashita Patriotika, dkk. Tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul “*The Analysis of Factors That Influence Human Development Index in West Java*”. Faktor yang dimasukkan dalam penelitian ini meliputi indikator pembangunan daerah, indikator kemiskinan, indikator pendidikan, dan indikator kesehatan. Dari

indikator-indikator tersebut ditetapkan variabel-variabel independent yang diuji dalam mempengaruhi IPM yaitu jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita, rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap usia penduduk 5-14 tahun, rasio jumlah guru SD dan SMP terhadap murid SD dan SMP, rasio jumlah sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah pelayan kesehatan terhadap penduduk, dan rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Dengan menggunakan metode regresi berganda dengan model panel data yang terdiri dari 25 unit *cross section* yaitu Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat dan 5 unit *time series* yaitu tahun 2005-2009, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh faktor-faktor yang dianalisis berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Barat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syafiatunnisa tahun 2017 dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015”. Dari hasil analisis diketahui variabel kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum regional memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dan upah minimum regional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan tahun 2018 oleh Arisman yang mengambil judul “*Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*”. Hasil pengolahan dengan model efek tetap menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.2  
Skema Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Variabel yang Mempengaruhi

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan landasan teori dan juga penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya, maka jawaban sementara yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Faktor Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Faktor Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).